

Penolakan Pemerintah Taliban Terhadap Norma Global Hak Pendidikan Perempuan di Afghanistan pada Periode 2021-2025

Alifia Azka Putri^{1*}, Fredericko Constantijn Yossia Yerronio Pangalila²

^{1,2}Magister Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Corresponding Author's e-mail: alifia.azka@ui.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2777 - 2790

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2921>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2921>

Article History:

Received: 18-06-2026

Revised: 10-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : Since the Taliban took control of the Afghan government, numerous issues have arisen, particularly violations of women's educational rights. Afghanistan, as a state that ratified various conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), has in practice violated the principles of both conventions. Using Acharya's concept of norm subsidiarity, this paper will analyze the Taliban government's efforts to navigate women's educational rights in Afghanistan through the rejection of global norms. The method used is qualitative analysis. This paper will utilize data related to violations of women's educational rights in Afghanistan, collected from websites, reports, articles, news portals, and books. The main research question is how the Taliban government navigated women's educational rights in Afghanistan through the rejection of global norms during the period 2021–2025. Based on the concept of norm subsidiarity, the hypothesis is that global norms in Asia do not always operate in a straightforward manner, but are also dynamic, experiencing rejection and the formation of counter-norms at the domestic level. Local agents also have the capacity to interpret and reject norms according to the cultural context and ideology of the local agents.

Keywords : Taliban, Norm Subsidiarity, Pashtun-Wali, Women.

Abstrak : Sejak Taliban berhasil memegang kendali pemerintahan Afghanistan, banyak sekali isu-isu yang terjadi, khususnya pelanggaran hak pendidikan terhadap perempuan. Afghanistan sebagai negara peratifikasi berbagai konvensi seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), tetapi secara praktiknya di bawah pemerintahan Taliban melakukan hal yang berkebalikan dengan prinsip yang ada di kedua konvensi tersebut. Dengan menggunakan konsep *norm subsidiarity* dari Acharya, tulisan ini akan menganalisis pemerintah Taliban dalam menavigasi hak pendidikan perempuan di Afghanistan melalui penolakan norma global. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tulisan ini akan menggunakan data-data terkait pelanggaran hak pendidikan perempuan di Afghanistan yang akan diambil melalui *website*, laporan, perjanjian internasional, artikel, portal berita, dan buku. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana pemerintah Taliban menavigasi hak pendidikan perempuan di Afghanistan melalui penolakan norma global pada periode 2021 – 2025. Berdasarkan konsep *norm subsidiarity*, hipotesis yang bisa diambil adalah bahwa norma global di Asia tidak selalu berjalan lurus, tetapi juga dinamis dengan mengalami penolakan dan pembentukan norma tandingan di tingkat domestik. *Local agents* juga memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan menolak norma sesuai dengan konteks budaya dan ideologi *local agents* tersebut.

Kata Kunci : Taliban, Norm Subsidiarity, Pashtun-Wali, Perempuan.

PENDAHULUAN

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menjelaskan bahwasanya hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh tiap-tiap individu tanpa terkecuali. Hal tersebut termasuk perempuan yang sering kali menjadi korban atas pelanggaran HAM. Padahal, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan setara sesuai dengan DUHAM. Maka dari itu, kesetaraan gender merupakan hal krusial yang kehadirannya tidak bisa kita abaikan. Meskipun ada kemajuan pada kesetaraan gender, diskriminasi gender tetap terjadi. Oleh karena itu, isu kesetaraan gender sampai saat ini masih sering dibicarakan di forum internasional.

Agar kesetaraan gender tercapai, komunitas internasional telah menetapkan standar hak asasi manusia yang harus dipenuhi tiap-tiap anggotanya melalui *Convention on the Elimination of All Forms Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Standar HAM tersebut dalam terlihat pada pasal 10 CEDAW “*states parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education....*” (United Nations General Assembly n.d.). Dari pasal tersebut sudah tertulis jelas bahwa pendidikan untuk semua baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya standar HAM melalui instrumen CEDAW tersebut, maka negara-negara yang meratifikasi harus mematuhi dan menghormati isi dari instrumen tersebut dan menjamin hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Namun, realitas di lapangan kasus ketidaksetaraan gender sering terjadi pada level domestik maupun internasional. Hal ini terlihat dalam laporan UN Women yang mana perempuan hanya menghasilkan sebanyak 77 sen untuk setiap 1 dolar yang dihasilkan oleh laki-laki (*pay gap*). Diskriminasi yang dialami oleh perempuan di lingkungan pekerjaan terlihat semakin berat, terutama bagi perempuan berkulit hitam, imigran, dan perempuan yang berkeluarga. Stigma negatif yang dibentuk oleh masyarakat terhadap perempuan yang memiliki anak, terlihat dari 35% perempuan di kawasan Asia Selatan mengalami kesenjangan upah berdasarkan gender (UN Women n.d.). Sebanyak 736 juta perempuan atau satu dari tiga perempuan di dunia menjadi korban kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan orang lain (UN Women n.d.). Banyak dari perempuan di dunia mengalami depresi dan penyakit, dampak dari kekerasan tersebut. Tak hanya itu, perempuan juga mengalami diskriminasi dalam bidang pendidikan. Masih terdapat perempuan yang tidak bersekolah, dampak dari kebijakan internal di negaranya. Perempuan yang mendapatkan pendidikan tentunya pola pikir mereka menjadi lebih kritis dan terbangun. Kecil kemungkinan perempuan yang memperoleh pendidikan untuk menikah dini, karena pemikiran kritis mereka yang sudah terstruktur (UNICEF n.d.). Maka dari itu memperjuangkan hak perempuan adalah suatu hal yang mendesak, karena kesetaraan gender menjadi prasyarat yang harus dicapai dalam SDGS untuk pembangunan berkelanjutan.

Salah satu negara anggota PBB yang terlihat kesenjangan nya terhadap norma global untuk perempuan adalah Afghanistan. Rezim Taliban secara terang-terangan melanggar standar norma yang terdapat dalam berbagai konvensi yang telah mereka ratifikasi sebelumnya. Diskriminasi terhadap hak pendidikan bagi perempuan yang dilakukan oleh Taliban terlihat dari penutupan sekolah untuk perempuan diatas kelas 7, membatasi akses mereka untuk memilih jurusan seperti kesehatan dan jurnalistik dikarenakan jurusan ini sulit untuk perempuan, menginstruksikan institusi yang lebih tinggi untuk menerima murid laki-laki saja, melarang penerbitan sertifikat atau ijazah untuk wisudawan perempuan, hingga melarang penerbitan buku karya perempuan di universitas Afghanistan (Qazi Zada and Qazi Zada 2024). Perlakuan Taliban terhadap perempuan Afghanistan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak hanya melanggar hak perempuan, tetapi juga mengabaikan standar HAM internasional.

Tindakan Taliban tersebut mengindikasikan adanya pertentangan antara keikutsertaan mereka dalam berbagai konvensi HAM internasional dan penerapan pada kebijakan domestik. Maka dari itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti karena di satu sisi masyarakat internasional sedang marak mempromosikan kesetaraan gender dan keikutsertaan Afghanistan sebagai anggota ratifikasi dalam berbagai konvensi HAM. Namun, disisi lain kebijakan yang Taliban keluarkan terhadap pendidikan terhadap perempuan berkebalikan dengan standar HAM global seharusnya. Implementasi norma internasional di Afghanistan adalah konstruksi norma yang bertentangan. Maka dari itu, muncul pertanyaan **“bagaimana pemerintah Taliban menavigasi hak pendidikan perempuan di Afghanistan melalui penolakan norma global pada periode 2021 – 2025?”**. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi darimana pemikiran Taliban terhadap perempuan berakar, sehingga membentuk struktur dan norma domestik. Lebih lanjut lagi, penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana norma domestik menandingi norma global, dan menjadikan norma global tidak relevan dalam praktik kebijakan domestik Afghanistan.

TINJAUAN PUSTAKA

Isu pelanggaran hak asasi perempuan di Afghanistan pengambilalihan pemerintah yang dilakukan Taliban pada tahun 2021 menjadi salah satu hal yang sering dibahas dalam pertemuan internasional. Hal ini dikarenakan keikutsertaan Afghanistan sebagai anggota ratifikasi dalam berbagai konvensi hak asasi manusia dan kebijakan diskriminatif mengenai pendidikan yang dikeluarkan oleh Taliban terhadap perempuan. Hal tersebut menunjukkan implementasi norma internasional di Afghanistan adalah konstruksi norma yang bertentangan. Maka dari itu penulis telah melakukan tinjauan terhadap beberapa artikel yang membahas mengenai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Afghanistan pasca pengambilalihan serta implikasinya terhadap pelaksanaan norma HAM internasional. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penulis akan menentukan *research gap*, yang kemudian diisi oleh penelitian penulis. Pembahasan tinjauan pustaka disusun sebagai berikut: (1) **Norma global mengenai hak pendidikan bagi perempuan**, (2) **Kebijakan Domestik Taliban dan Realitas Diskriminasi Hak Pendidikan terhadap Perempuan Afghanistan**

Norma Global mengenai Hak Pendidikan Bagi Perempuan

Sejak tahun 1990-an, isu hubungan internasional kontemporer semakin menjadi perhatian di dunia internasional. Hal ini dikarenakan isu-isu yang terjadi tidak bisa disingkirkan oleh komunitas internasional dan akan terus menjadi pembahasan sampai saat ini. Norma internasional telah menjadi suatu hal yang harus ditaati dan dihormati oleh para anggota PBB. Afghanistan sebagai salah satu anggota PBB dan partisipan dalam berbagai konvensi khususnya mengenai hak pendidikan sudah seharusnya menghormati apa yang menjadi keharusannya. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi dan menandatangani *convention on the rights of the child* dan *convention on the elimination of all forms of discrimination against women*, Afghanistan harus menjamin pendidikan untuk semua tanpa terkecuali. Hak pendidikan adalah hak paling mendasar.

Dalam artikel milik (Tsabitah Rizqi Ekanoviarini and Aji Wibowo 2022) menekankan bahwa Afghanistan secara formal masih terikat dengan konvensi *convention on the elimination of all forms of discrimination against women* (CEDAW) maupun *convention on the rights of the child* (CRC), yang mana tiap-tiap kebijakan domestik yang melanggar hak pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan adalah bentuk dari pelanggaran terhadap komitmen keanggotaan mereka. Konvensi-konvensi tersebut menempatkan hak pendidikan sebagai hak universal dan bersifat non-diskriminasi. Artikel (Tsabitah Rizqi Ekanoviarini and Aji Wibowo

2022) menyoroti bahwa pengakuan formal terhadap suatu norma internasional terkait hak pendidikan untuk perempuan belum secara otomatis menjamin pemenuhannya. Negara tetap menjadi aktor yang memastikan pelaksanaan itu agar terwujud. Artikel ini menekankan tanggung jawab negara sebagai aktor utama untuk melindungi dan memenuhi hak pendidikan.

Ketika sebuah negara gagal dalam melindungi hak pendidikan tersebut, dapat dikategorikan bahwa negara sudah melanggar kewajiban sebagai sebuah aktor yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak pendidikan. Artikel milik (Tsabitah Rizqi Ekanoviarini and Aji Wibowo 2022) juga menyoroti di negara berkembang yang sedang mengalami konflik dan transisi politik, sering kali instabilitas ini menjadikan negara tidak bisa melakukan pemenuhan terhadap kewajiban mereka sebagai aktor. Hal inilah yang menyebabkan negara sering kali mengabaikan tanggung jawab mereka. Pembahasan ini diperluas dengan hadirnya artikel (Qazi Zada and Qazi Zada 2024), terlihat bagaimana ketika norma internasional dihadapkan dengan kompleksitas sosial-politik di negara Afghanistan. Sejak Taliban kembali berkuasa, sering kali mereka mengeluarkan dekret melarang perempuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mereka menyoroti lemahnya struktur institusional yang mampu menegakkan hak pendidikan menyebabkan norma ini tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dalam kondisi ini, norma internasional tidak bisa berdiri karena berhadapan dengan kompleksitas sosial-politik Afghanistan.

Artikel-artikel di atas menegaskan bahwa persoalan di atas bukan karena tidak adanya norma, tetapi kegagalan pemerintah domestik dalam menerapkannya. Efektif atau tidaknya sebuah norma tergantung pada kondisi politik dan kapasitas negara tersebut. Lemahnya institusi negara dan kondisi tidak sosial-politik yang tidak stabil di negara tersebut menjadikan norma menemukan titik sulitnya.

Kebijakan Domestik Taliban dan Realitas Diskriminasi Hak Pendidikan terhadap Perempuan Afghanistan

Kebijakan domestik Afghanistan terkait hak pendidikan menunjukkan kompleksitas kondisi sosial-politik di negara tersebut. Artikel (Andani, Putri, and Darmawan 2021) memperlihatkan bagaimana di negara berkembang terkait pelaksanaan implementasi hak asasi manusia, mengikuti keinginan dari *elite* politik yang sedang berkuasa saat itu. Dalam konteks Afghanistan, hal tersebut memang benar adanya dan menjadi relevan. Ini dikarenakan, negara Afghanistan sudah meratifikasi berbagai konvensi terkait hak asasi manusia, tetapi dalam penerapannya terbentur dengan dinamika Taliban yang berkuasa di negara tersebut saat ini. Hal ini memperlihatkan Taliban berorientasi pada kontrol sosial dan politik, dibandingkan dengan komitmen internasional mereka. Artikel (Hamidi 2024) memperlihatkan diskriminasi atau pembatasan pendidikan yang dilakukan oleh Taliban akan berdampak pada peningkatan angka pernikahan dini dan migrasi menjadi konsekuensi dari kebijakan diskriminasi yang dilakukan oleh Taliban.

Apa yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan Afghanistan akan menjadi senjata yang tentunya akan berbalik ke mereka. Bagaimana ketidakstabilan ekonomi dan angka buta huruf akan meningkat, dampak dari diskriminasi dan pembatasan pendidikan yang dilakukan oleh Taliban. Artikel (Hussain Amiri 2023) memperluas bahwa Taliban telah melakukan penghapusan terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Ini dikarenakan Taliban mengeluarkan dekret yang membatasi perempuan dalam memperoleh pendidikan. Pemerintah sebelumnya sudah berupaya dan memberi kesempatan untuk anak perempuan dan perempuan Afghanistan dalam memperoleh pendidikan. Artikel (Hussain Amiri 2023) menjelaskan larangan melanjutkan pendidikan khususnya dalam pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi adalah upaya dari strategi Taliban untuk mensubordinasikan perempuan dan membuat suara perempuan akan ketidaksetaraan menjadi hilang seiring dengan masifnya dekret-dekret yang dikeluarkan oleh Taliban. Menurut artikel (Hussain Amiri 2023) memarginalkan perempuan merupakan hal yang dilakukan oleh Taliban agar bisa mempertahankan kekuasaannya dalam jangka panjang. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana Taliban mengutamakan legitimasi internasional, dibandingkan dengan reputasi internasional mereka di masyarakat global. Artikel lainnya, (Keshavarzi et al. 2025) memberikan kontribusi terkait efek sosial terhadap perempuan di Afghanistan. Perubahan ini disebut oleh Keshavarzi sebagai “perubahan sosial reaktif yang cepat”, artinya perubahan sosial yang terjadi dengan cepat, karena Taliban berusaha mengembalikan nilai-nilai konservatif. Perubahan cepat ini sangat dirasakan dampaknya oleh kebanyakan perempuan Afghanistan. Hal ini terlihat dari wawancara dan survei yang dilakukan (Keshavarzi et al. 2025), menunjukkan perempuan kehilangan harapan akan masa depan, ketakutan karena tidak memiliki uang yang cukup untuk menyambung hidup terutama bagi perempuan yang ditinggal oleh suami, dan ketakutan-ketakutan yang muncul akibat perubahan cepat ini. Meskipun adanya ketakutan-ketakutan ini, perempuan Afghanistan banyak yang tidak tinggal diam, mereka melakukan perlawanan agar bisa menegakkan hak dasar mereka yaitu memperoleh pendidikan. Mereka juga melakukan adaptasi terhadap kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Taliban, meskipun ruang gerak mereka semakin hari semakin dipersempit.

Dari artikel-artikel diatas, diskriminasi tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Dampak tersebut tidak hanya dalam kesehatan mental, tetapi juga menyeluruh ke segala bidang. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan diskriminatif tersebut muncul dan terus dipertahankan oleh Taliban. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk memahami kesenjangan antara norma internasional dan penerapannya dalam kebijakan domestik Afghanistan.

KERANGKA ANALISIS

Norm subsidiarity

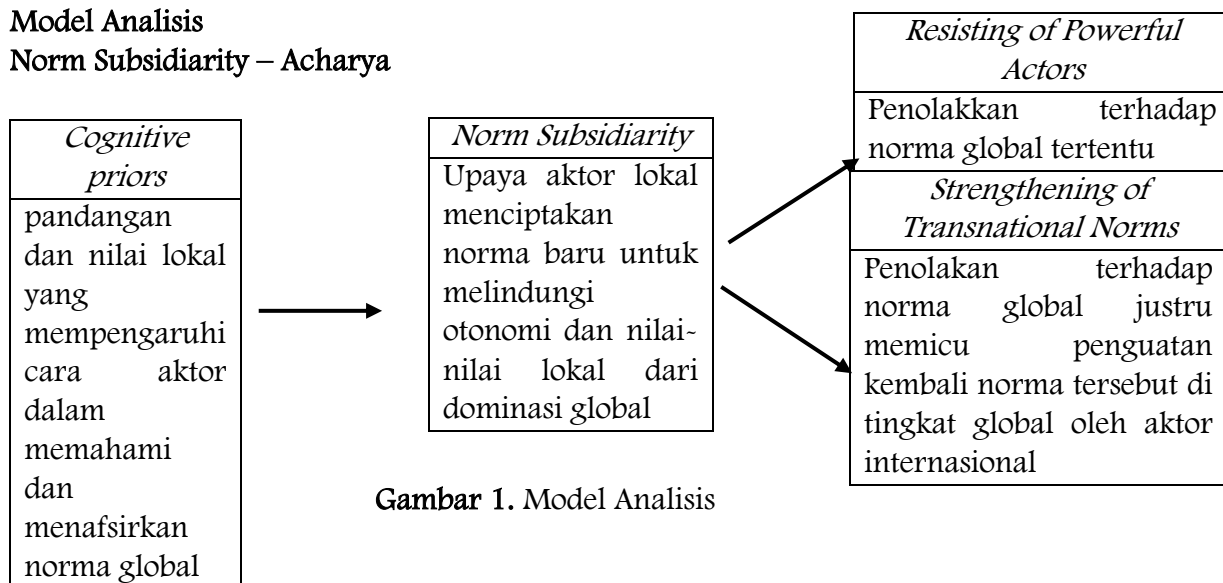
Konsep *norm subsidiarity* dikembangkan oleh Acharya untuk menjelaskan bagaimana aktor domestik menciptakan norma tandingan atas norma internasional yang dianggap mengancam kepentingan dan identitas mereka. Acharya menyatakan bahwa aktor domestik tidak pasif dalam menerima norma internasional ia bisa melokalisasi bahkan menciptakan norma tandingan sendiri. *Norm subsidiarity* hadir di penelitian ini untuk melengkapi penjelasan dari konstruktivisme dikarenakan konstruktivisme sering kali mengasumsikan bahwa aliran norma bergerak satu arah tanpa mempertimbangkan bahwa terdapat aktor domestik yang dapat menerima dan menolak norma internasional untuk menyebar di negara sesuai dengan budaya dan warisan nilai mereka. Acharya mendefinisikan *norm subsidiarity* sebagai proses dimana aktor domestik menciptakan aturan mereka sendiri untuk mempertahankan otonomi mereka dari dominasi Barat (Acharya 2011). *Norm subsidiarity* ini digunakan oleh dunia ketiga atau wilayah Asia untuk menyatakan kemandirian normatif mereka dari norma yang diciptakan oleh Barat.

Dari hal tersebut muncul lah *cognitive priors*, yaitu ide, norma, dan aturan-aturan atau sistem kepercayaan yang telah ada. *Cognitive priors* ini dapat berasal dari budaya negara tersebut. *Cognitive priors* ini merupakan menentukan apakah suatu norma harus di adopsi atau ditolak. Jika lokalisasi norma bersifat *inward looking*, sedangkan *norm subsidiarity* bersifat *outward looking*. Oleh karena itu, Acharya melihat bahwa *norm subsidiarity* memperlihatkan hubungan antara norma internasional dan domestik bukanlah satu arah melainkan hubungan

yang dinamis, resistensi, dan rekonstruksi makna (Acharya 2011). Dari *cognitive priors* maka lahirlah *subsidiarity norms*. *Norm subsidiarity* ini merupakan norma yang dikonstruksikan secara lokal untuk melindungi kemandirian normatif aktor lokal dan membatasi dominasi Barat. *Subsidiarity* ini merupakan redefinisi dari norma Barat. Dari sini, proses *norm subsidiarity* memiliki dua akibat yaitu *strengthening effect* dan *resisting/challenging effect*. Pada *resisting effect*, aktor domestik cenderung melakukan penolakan terhadap norma luar. Sedangkan pada *strengthening effect*, Acharya menjelaskan bahwasanya *strengthening effect* terjadi karena aktor lokal memperkuat norma global karena sesuai dengan kepentingan mereka. Tak hanya itu dalam beberapa kasus dapat dikatakan bahwa dalam *strengthening effect* bukan hanya bisa saling memengaruhi, tetapi juga menghasilkan efek berlawanan (Acharya 2011).

Model Analisis

Norm Subsidiarity – Acharya



Gambar 1. Model Analisis

Sumber: (Acharya 2011) (diolah oleh penulis, 2025)

Model analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep *norm subsidiarity* Acharya untuk menjelaskan bagaimana indikasi Taliban menciptakan norma tandingan dari norma global sebagai bentuk anti-Barat yang dianut Taliban (Acharya 2011). Konsep ini memperlihatkan aktor domestik yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan norma tandingan tersebut. Hal ini dilakukan mereka untuk mempertahankan otonomi dari dominasi Barat. Operasionalisasi ini mengidentifikasi tiga hal dalam *norm subsidiarity* yang dijelaskan oleh Acharya, yaitu 1) *cognitive priors*, yaitu ide, norma, dan aturan-aturan atau sistem kepercayaan yang telah ada. *Cognitive priors* ini dapat berasal dari budaya negara tersebut. 2) *Subsidiarity norms*, norma yang dikonstruksikan secara lokal untuk melindungi kemandirian normatif aktor lokal dan membatasi dominasi global. *Subsidiarity* ini merupakan redefinisi dari norma global. 3) Hasil interaksi berupa *resisting effect* dan *strengthening effect*. Pada *resisting effect*, aktor domestik cenderung melakukan penolakan terhadap norma luar. Hal tersebut dilakukan karena bertentangan dengan ideologi mereka. Pada *strengthening effect*, Acharya menjelaskan bahwasanya *strengthening effect* terjadi karena aktor lokal memperkuat norma global karena sesuai dengan kepentingan mereka (Acharya 2011). Dalam hal ini biasanya negara melakukan *strengthening* pada norma global yang dianggap positif. Acharya dalam tulisannya juga menegaskan bahwa antara norma global dan domestik itu penuh dengan gejolak, bisa memengaruhi dan memberikan efek berlawanan. Sebagai contoh, suatu negara menolak norma

global dan memunculkan norma tandingan, hal tersebut bisa memicu reaksi dari dunia internasional ataupun aktor domestik yang mendukung norma global untuk berupaya memperkuat norma global yang ditolak. Dengan kata lain, *resisting effect* memicu dampak sekunder penguatan norma global (Acharya 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan kata-kata dibandingkan angka. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, makna, dan konteks sosial yang mengelilingi subjek kajian. Dengan cara ini, penelitian kualitatif mampu menangkap nuansa dan kompleksitas yang sulit diukur secara numerik, sehingga sangat relevan dalam studi-studi yang memerlukan interpretasi mendalam terhadap realitas sosial. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan sumber-sumber dari *website* yang relevan dan kredibel. Hal tersebut berupa laporan organisasi internasional, perjanjian internasional, portal berita, buku, dan artikel jurnal. Untuk pengumpulan data analisis data dalam kualitatif, menurut Bryman adalah iteratif yaitu bukan tahap yang kaku. Proses ini bersifat fleksibel dan interaktif. Selain itu, peneliti akan menggunakan triangulasi data atau sumber agar meningkatkan validitas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan berbagai data dari laporan organisasi internasional, portal berita, perjanjian internasional, artikel, dan buku. Dengan metode kualitatif ini penulis akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait permasalahan yang terjadi di Afghanistan (Bryman 2012).

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan kata-kata dibandingkan angka. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, makna, dan konteks sosial yang mengelilingi subjek kajian. Dengan cara ini, penelitian kualitatif mampu menangkap nuansa dan kompleksitas yang sulit diukur secara numerik, sehingga sangat relevan dalam studi-studi yang memerlukan interpretasi mendalam terhadap realitas sosial. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan sumber-sumber dari *website* yang relevan dan kredibel. Hal tersebut berupa laporan organisasi internasional, perjanjian internasional, portal berita, buku, dan artikel jurnal. Untuk pengumpulan data analisis data dalam kualitatif, menurut Bryman adalah iteratif yaitu bukan tahap yang kaku. Proses ini bersifat fleksibel dan interaktif. Selain itu, peneliti akan menggunakan triangulasi data atau sumber agar meningkatkan validitas. Hal ini dilakukan dengan membandingkan berbagai data dari laporan organisasi internasional, portal berita, perjanjian internasional, artikel, dan buku. Dengan metode kualitatif ini penulis akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terkait permasalahan yang terjadi di Afghanistan (Bryman 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cognitive Priors: Ideologis dan Identitas Taliban terhadap Pendidikan Perempuan Afghanistan

Afghanistan merupakan negara yang terletak di wilayah Asia Selatan dengan mayoritas penduduknya suku *Pashtun*. Pemerintahan Taliban banyak dipengaruhi oleh prinsip suku *Pashtun*. (Minority Rights Group 2021). *Pashtun-Wali* merupakan kumpulan prinsip mengenai pedoman hidup dalam bersosial dan bermasyarakat di lingkungan suku *Pashtun* dan berfungsi sebagai konstitusi tidak tertulis. Prinsip ini sangat dijunjung tinggi dan dijalankan oleh mereka yang tinggal di pedesaan. Hal ini dikarenakan, mereka masih ketat dalam menggunakan prinsip *Pashtun-wali* dan juga hukum adatnya. Kode etik yang harus ditaati oleh suku *Pashtun* di dalam

prinsip *Pashtun-Wali*, antara lain *nang* (kehormatan), *zan* (perempuan), *zar* (kekayaan), dan *zameen* (tanah) (Eslami and Safari 2022). Dari keempat prinsip tersebut, suku *Pashtun* sangat menjunjung tinggi prinsip kehormatan. Maka dari itu, siapapun yang melanggar kehormatan tersebut maka itu adalah penghinaan terburuk bagi keluarga dan suku menurut tradisi mereka (Eslami and Safari 2022).

Prinsip kehormatan di *Pashtun-Wali* bertentangan dengan hak-hak perempuan global. Misalnya, prinsip ini membatasi kehadiran perempuan dalam bermasyarakat. Berdasarkan prinsip ini, jika perempuan *Pashtun* hadir di ruang publik, maka stigma tidak dihormati akan menempel pada keluarga mereka. Ketika anak perempuan belum beranjak dewasa, mereka masih diperbolehkan untuk hidup bermasyarakat. Namun, ketika mereka sudah beranjak dewasa, para perempuan *Pashtun* dipaksa untuk menikah (Aunurrochim Bin Mas'ad et al. 2014). Tradisi inilah yang kemudian membentuk pola pikir atau ideologi atau identitas Taliban dalam memandang peran perempuan.

Pashtun-Wali kemudian berfungsi sebagai *cognitive priors* yang membentuk ideologi dan identitas Taliban. Pola pikir Taliban yang sudah terkonstruksi ini, kemudian menciptakan kebijakan-kebijakan yang bisa dilihat di Afghanistan saat ini. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan benturan antara norma domestik dan norma global mengenai hak perempuan di negara ini.

Pembentukan *Subsidiarity Norms*: Redefinisi Pendidikan sebagai Instrumen Kekuasaan dan Membatasi Dominasi Global

Taliban menggunakan instrumen pendidikan untuk arena pembentukan norma lokal yang berfungsi menegaskan kembali otoritas ideologisnya. Dalam konferensi pers pertama setelah berhasil merebut pemerintahan Afghanistan, perwakilan Taliban Mullah Mohammad Hassan menyampaikan “*girls education has resumed to a large extent and there is hope that the education will be further facilitated*”. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa taliban berharap akses pendidikan akan lebih difasilitasi di masa depan. Namun, klaim taliban tersebut berbanding terbalik dengan praktik pendidikan kedepannya (FRE/RL's Radio Azadi 2021). Menurut laporan UNESCO, bahwa sejak pengambilalihan kekuasaan, DFA secara sistematis melarang akses pendidikan bagi 1,4 juta perempuan Afghanistan dalam memperoleh pendidikan menengah dan tinggi (RFE/RL's Radio Azadi 2024). Pelarangan ini didasarkan pada kurikulum yang ada tidak sesuai dengan nilai Islam dan moralitas yang dipahami oleh rezim Taliban (RFE/RL's Radio Azadi 2024). Melalui penyesuaian kurikulum tersebut, Taliban kemudian menciptakan standar pendidikan yang berbeda dengan tatanan global, yang kemudian menjadi “norma lokal alternatif”.

Kontrol Taliban terhadap pendidikan terlihat semakin kuat di wilayah yang dikendalikan oleh mereka. Hal ini terlihat dari mata pelajaran yang terkait dengan isu kesetaraan, kebebasan, pemilu, dan demokrasi dihapus karena dinilai oleh Taliban tidak sesuai dengan nilai lokal Taliban (Hein 2024). Tak hanya berhenti disitu saja, mereka juga menghapus pendekatan pendidikan yang bersifat inklusif dan non-diskriminatif, yang artinya tidak ada lagi sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bagi semua orang tanpa membedakan agama, jenis kelamin, dan ras. Selain membatasi akses pendidikan bagi perempuan, Taliban turut mempersempit ruang keberagaman dan kualitas pendidikan. Terlihat dari Taliban yang membatasi program literasi dan pelatihan kejurusan terhadap anak perempuan yang disabilitas. Akibat dari tindakan yang mereka lakukan, banyak akademisi dan intelektual meninggalkan Afghanistan. Tak hanya itu, Taliban juga banyak memecat guru dan dosen yang tidak sejalan dengan ideologi mereka (Hein 2024). Akibatnya, kualitas pendidikan di Afghanistan menjadi

turun. Rahimi, Deputy Menteri Pendidikan sebelum Taliban mengambil alih, mengatakan “*the Taliban are currently focusing on expanding their religious schools, the madrassas, and this is a dangerous development*”, yang menunjukkan bahwa saat ini Taliban tengah berfokus pada perluasan sekolah berbasis madrasah (Hein 2024). Hal ini berpotensi memperkuat sistem pendidikan yang berorientasi doktrin agama bukan pada pendidikan umum yang meliputi ilmu pengetahuan. Taliban secara langsung menciptakan generasi terdidik tanpa kemampuan kritis (Hein 2024).

Selain persoalan kurikulum yang tidak sesuai dengan nilai Islam dan moralitas, terdapat motif politik dibalik kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban. Rezim Taliban berupaya melakukan redefinisi hak pendidikan bagi perempuan demi mempertahankan rezim mereka. Hak atas pendidikan yang sebelumnya diakui oleh pemerintahan sebelumnya, kini menjadi hak yang ditentukan berdasarkan oleh pandangan ideologi mereka. Redefinisi ini sekaligus membentuk norma tandingan terhadap norma global terkait hak pendidikan untuk semua (Hilal 2024).

Apa yang dilakukan oleh Taliban sejalan dengan apa yang dimaksud Acharya terkait *subsidiarity norms* yang berfungsi untuk melindungi otonomi normatif dari dominasi global. Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan tersebut bukanlah kebijakan sementara, melainkan strategi ideologis dan politik mereka untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan Taliban dan mengontrol ruang gerak sosial dan berpolitik perempuan Afghanistan. Melalui kontrol terhadap pendidikan, Taliban melanggengkan kekuasaannya atas masyarakat sekaligus mengurangi ruang kritis yang dapat meruntuhkan rezim mereka. Akibatnya, kebijakan diskriminasi terhadap pendidikan perempuan yang dikeluarkan oleh Taliban justru menurunkan sumber daya manusia yang dapat memajukan negara Afghanistan. Untuk memajukan sebuah negara, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang juga memiliki keahlian dan berpendidikan. Namun, pembatasan pendidikan telah menghambat lahirnya sumber daya manusia yang kritis. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban yang sarat akan agenda politik dibelakangnya, menunjukkan bahwa pendidikan dijadikan alat untuk menjaga legitimasi kekuasaan mereka. Dengan demikian, pembentukan norma lokal ini bukan sekedar penolakan terhadap norma global, tetapi merupakan bentuk kemandirian normatif dan identitas mereka di hadapan dominasi nilai global.

Resisting Effect dan Strengthening Effect Terhadap Norma Global Kesetaraan Gender

1. Resisting Effect

Taliban menunjukkan *resisting effect* yang kuat terhadap norma global terkait kesetaraan gender dan hak pendidikan secara universal yang sudah diatur dalam CEDAW dan CRC. Hal tersebut terlihat dari Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Nida Mohammad Nadim yang menyatakan bahwa anak perempuan diatas kelas 6 dilarang melanjutkan pendidikan sekolah menengah dan tinggi (Chessya and Yulianto 2024). Dalam laporan UNESCO disebutkan, 1,4 juta perempuan dilarang menempuh pendidikan menengah dan tinggi sekembalinya Taliban di Afghanistan pada tahun 2021 (Aljazeera 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap norma global diwujudkan melalui kebijakan pembatasan yang terstruktur dan tersistematis. Pendidikan yang semulanya dapat diakses oleh semua kalangan, kini dibatasi secara eksplisit dan harus sesuai dengan ideologi Taliban. Pendidikan formal diganti dengan pendidikan agama yang cenderung sesuai dengan ideologi Taliban.

Penolakan ini terlihat dari sikap Taliban terhadap tekanan komunitas internasional. Dalam laporan UNICEF, DFA menolak ajakan global untuk mengembalikan hak pendidikan perempuan seperti sedia kala dan urusan pendidikan perempuan adalah urusan internal mereka (UNICEF 2025). Taliban beralasan pendidikan harus selaras

dengan syariat Islam dan tradisi mereka. Dalam laporan *human rights watch*, wilayah yang terdapat sekolah dan dikuasai oleh Taliban, dapat dipastikan sekolah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya (Human Rights Watch 2020). Penutupan sekolah-sekolah ini dikarenakan Taliban tidak melihat apa manfaat sekolah bagi perempuan. Ini memperlihatkan pandangan patriarki yang kuat di tubuh rezim Taliban dan memandang pendidikan sebagai ancaman yang dapat meruntuhkan legitimasi politik mereka (Human Rights Watch 2020).

Delegasi PBB dalam tiap pertemuannya sering kali membahas terkait larangan pendidikan bagi perempuan, dan beberapa anggota Taliban lebih terbuka dalam membahas sejumlah pembatasan. Namun, pendapat mereka tidak berpengaruh di tubuh pembuat kebijakan Taliban. Ini menegaskan bahwa tidak ada jaminan akan adanya perubahan kebijakan di tubuh Taliban. Dalam survei yang dilakukan oleh UN Women dan diikuti oleh 2000 masyarakat Afghanistan menemukan lebih dari 90% masyarakat Afghanistan sebenarnya mendukung pendidikan untuk perempuan (Security Council 2023). Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara nilai masyarakat dan kebijakan rezim Taliban.

Taliban memiliki ketakutan yang kuat terhadap perempuan yang berpendidikan tinggi. Hal ini terlihat dari pernyataan salah satu perempuan Afghanistan melalui interview yang dilakukan oleh universitas Princeton “*the taliban have a strong fear of educated women because they know if a woman gets education, she won’t raise a Talib*”. Hal ini dikarenakan, jika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, mereka khawatir akan membuat perempuan lebih mandiri dan kritis. Dengan kata lain, perempuan yang pendidikan tinggi dianggap berbahaya oleh taliban karena dapat melemahkan legitimasi politik mereka di masa yang akan datang. Maka dari itu, dapat dilihat taliban sangat membatasi pendidikan untuk perempuan (Shaheed and Sultani 2024).

Hal ini menguatkan bahwa *resisting effect* bukan sekadar penolakan, tetapi strategi lokal yang dirancang untuk mempertahankan kemandirian normatif agen lokal. Hal ini menjadikan mereka dapat menolak norma global dan mendefinisikan norma sendiri. Fenomena yang terjadi di Afghanistan menggambarkan bagaimana *resisting effect* berperan dalam konteks *norm subsidiarity*. Aktor lokal yaitu Taliban dengan sadar melakukan penolakan norma global karena norma tersebut bertentangan dengan ideologi mereka dan menciptakan norma tandingan terhadap norma global. Proses ini menegaskan bahwa norma global tidak otomatis dapat diterima di wilayah Asia atau dunia ketiga, melainkan bisa ditolak dan digantikan dengan norma lokal yang dapat mempertahankan identitas lokal agen.

2. *Strengthening Effect*

Sejak Taliban memberlakukan pelarangan pendidikan bagi perempuan untuk jenjang menengah dan tinggi, muncul gerakan global yang semakin kuat untuk menegaskan bahwa hak pendidikan adalah hak universal, bukan hak tergantung pada kebijakan lokal. Kampanye seperti *Afghan Girls Voices* yang dilaksanakan oleh *EducationCannotWait* telah mengangkat suara perempuan Afghanistan yang tidak terdengar di ruang publik. Para aktivis online dan organisasi internasional menggunakan platform ini untuk menggalang dukungan dan menuntut perubahan. Hal ini memperlihatkan bagaimana pengekan yang dilakukan oleh Taliban justru memicu penguatan norma global baik oleh organisasi internasional maupun aktor yang pro terhadap kesetaraan gender (*EducationCannotWait* n.d.). Amnesti internasional juga menyuarakan bahwa penolakan terhadap pendidikan perempuan di Afghanistan bukan hanya masalah lokal, melainkan bagian dari perjuangan

global untuk mewujudkan pendidikan yang setara baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kampanye yang dilakukan oleh Amnesti internasional “*ignorance is no match for the power of knowledge and education*”, mereka menekankan bahwa pendidikan bukan hanya hak melainkan juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan (Robina Azizi 2025). Amnesti internasional menekankan apa yang dilakukan oleh Taliban adalah upaya sistematis untuk membungkam perempuan agar dapat melanggengkan kekuasaan mereka (Robina Azizi 2025).

Sementara itu, UN Women merilis survei bahwa 90% warga Afghanistan mendukung hak perempuan untuk sekolah. Hal ini dimanfaatkan oleh PBB sebagai dasar kampanye internasional untuk menekan Taliban agar dapat melunakkan kebijakan mereka terkait pelarangan pendidikan (UN Women 2025). Dengan kata lain, kebijakan Taliban justru memicu dan memperkuat keyakinan bahwa hak pendidikan adalah hak universal. Menurut *human rights watch*, banyak organisasi yang bekerja sama untuk memberikan akses pendidikan alternatif, termasuk bantuan sekolah daring rahasia dan bantuan untuk guru perempuan yang kehilangan pekerjaannya (Fetrat 2025). Dalam laporannya, *human rights watch* menegaskan bahwa tindakan Taliban justru memicu gelombang baru solidaritas dan kerja sama global dalam memperjuangkan hak dasar perempuan Afghanistan (Fetrat 2025). UN Women Afghanistan meluncurkan platform daring yang dapat digunakan oleh perempuan Afghanistan “*After August*”. Sebuah platform untuk mendokumentasikan kehidupan perempuan Afghanistan dengan berbagi pengalaman mereka hidup di bawah pemerintahan Taliban yang mendiskriminasi hak pendidikan perempuan. *After August* berkolaborasi dengan *zan times*, *limbo*, dan *independent storytellers*. Dengan hadirnya platform ini, menjadikan dunia global dapat melihat kondisi nyata yang dialami oleh perempuan Afghanistan dengan penulisnya perempuan Afghanistan itu sendiri (UN Women 2023). Dengan demikian, dalam fenomena yang terjadi di Afghanistan terlihat jelas apa yang disebut oleh Acharya sebagai *strengthening effect*, yaitu ketika penolakan yang dilakukan oleh Taliban terhadap norma global justru memicu reaksi global untuk memperkuat norma global dan memperjuangkan kesetaraan gender.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adaptasi norma global di Asia tidak selalu berjalan lurus, tetapi dinamis dengan mengalami penolakan dan pembentukan norma tandingan di tingkat domestik. Dengan menggunakan konsep *norm subsidiarity* dari Acharya, penelitian ini menemukan bahwa hubungan norma global dan lokal bersifat dinamis. *Local agents* memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan menolak norma sesuai dengan konteks budaya dan ideologi *local agents* tersebut.

Cognitive priors yang bersumber dari budaya prinsip *Pashtun-wali* menjadi dasar ideologis bagi Taliban dalam membentuk cara pandang terhadap peran perempuan di masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam Pashun-wali yaitu *nang* (kehormatan) dan kepatuhan terhadap tradisi digunakan sebagai dasar untuk membenarkan perlakuan pembatasan ruang publik bagi perempuan. Prinsip ini membentuk pola pikir bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi, karena mengancam tatanan sosial dan moral yang sudah mereka pertahankan. Dari dasar ideologis tersebut, Taliban menciptakan *subsidiarity norms* yang berfungsi untuk melindungi kemandirian normatif dan membatasi dominasi global. Taliban melakukan redefinisi terhadap hak pendidikan dengan menjadikannya alat politik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Pelarangan pendidikan perempuan dan penggantian kurikulum berbasis keagamaan merupakan

bentuk nyata dari ideologis ini. Dalam pandangan Taliban, kebijakan pendidikan bukan hanya soal sistem belajar, tetapi instrumen untuk menegaskan otoritas dan menolak intervensi asing dalam urusan domestik. Dengan demikian, Taliban menavigasi hak pendidikan perempuan bukan melalui adopsi norma global, melainkan menciptakan norma lokal alternatif untuk menandingi norma global.

Penelitian ini juga menemukan dua efek yaitu *resisting* dan *strengthening*. *Resisting effect* terlihat dari sikap Taliban yang menolak norma global karena norma global bertentangan dengan keyakinan dan ideologis mereka. Penolakan ini juga merupakan strategi untuk mempertahankan identitas ideologis dan kekuasaan politik. Taliban menggunakan kebijakan pendidikan sebagai cara untuk mengontrol masyarakat serta mempersempit ruang perempuan agar tetap berada di bawah pengawasan rezim. Namun, penolakan itu justru memicu *strengthening effect* di tingkat internasional. Pelanggaran terhadap hak pendidikan perempuan memicu gelombang solidaritas dari berbagai organisasi internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav. 2011. *Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sovereignty, Regionalism, and Rule-Making in the Third World*. Vol. 55.
- Aljazeera. 2024. "Taliban 'Deliberately Deprived' 1.4 Million Girls of Schooling: UN." <https://www.aljazeera.com/news/2024/8/15/taliban-deliberately-deprived-1-4-million-girls-of-schooling-un>.
- Andani, Rafika Wahyu, Rania Nabilla Putri, and Muhamad Afdhel Darmawan. 2021. "Segitiga Kekerasan, HAM, Dan Perempuan Afghanistan Era Taliban." *Jurnal Pena Wima* 2(1).
- Aunurrochim Bin Mas'ad, Muhammad, Mariam Saidonatagoranao, Hekmatullah Muradi, and Faiz Murad. 2014. "Marriage Rights of Afghan Women in Traditional Practices and Legislation Protection." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah* XIV(02). doi:10.15408/ajis.v14i2.1278.
- Bryman, Alan. 2012. "The Nature of Qualitative Research Chapter Outline." Pp. 379–87 in *Social Research Methods 4 TH Edition*. oxford university press.
- Chessya, Veranda, and Achmad Yulianto. 2024. "Penegakan Nilai-Nilai CEDAW Dalam Kebijakan Taliban Terhadap Perempuan Afghanistan Tahun 2021-2023." *Diversi Jurnal Hukum* 10(1).
- EducationCannotWait. n.d. "#AfghanGirlsVoices." Retrieved October 23, 2025. <https://www.educationcannotwait.org/afghan-girls-voices>.
- Eslami, R., and M. Safari. 2022. "The Role of Pashtunwali Ethnic Tradition in the Historical Articulation of the Taliban Discourse in Negotiations with the Afghan Government." *Journal of World Sociopolitical Studies* 6(2):371–409. doi:10.22059/wsps.2023.346782.1312.

- Petrat, Sahar. 2025. "Taliban Deny Afghan Girls' Their Education and Future." <https://www.hrw.org/news/2025/09/17/taliban-deny-afghan-girls-their-education-and-future>.
- Fitz Gibbon, Kate. 2021. "Pashtunwali: Pashtun Traditional Tribal Law in Afghanistan." *Cultural Property News*, August 28.
- FRE/RL's Radio Azadi. 2021. "Afghanistan's Taliban Premier Gives First Speech To Nation." <https://www.rferl.org/a/31582916.html>.
- Hamidi, Abdul Basir. 2024. "Restriction Policy on Afghan Girls' Education and Its Consequences." *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan* 3(2):228–43. doi:10.56916/ejip.v3i2.691.
- Hein, Shabnam Von. 2024. "Taliban Overhaul Afghanistan's Education System." <https://www.dw.com/en/taliban-overhaul-afghanistans-education-system/a-70913020>.
- Hilal, Imad. 2024. "THE TALIBAN WAR ON WOMEN'S EDUCATION A HUMAN RIGHT CRISES IN AFGHANISTAN." *International Journal of Contemporary Issues in Social Sciences* 3(3). <https://ijciss.org/>.
- Human Rights Watch. 2020. "You Have No Right to Complain' Education, Social Restrictions, and Justice in Taliban-Held Afghanistan." <https://www.hrw.org/report/2020/06/30/you-have-no-right-complain/education-social-restrictions-and-justice-taliban-held>.
- Hussain Amiri, Mir. 2023. "Obstacles to Women's Rights to Education: The Taliban Regime and Its Policies on Women's Education in Afghanistan." *Journal of Asian Social Science Research* 5(2):167–84. <https://cassr.net/jassr/>.
- Keshavarzi, Saeed, Julia C. Becker, Ali Ruhani, and Fateme Ebrahimi. 2025. "Responses to the Rapid Reactionary Social Change: A Social-Psychological Investigation of Young Afghan Women's Experiences during the Second-Taliban Era." *International Journal of Intercultural Relations* 108. doi:10.1016/j.ijintrel.2025.102250.
- Minority Rights Group. 2021. "Afghanistan." <https://minorityrights.org/country/afghanistan/#:~:text=The%20main%20ethnic%20groups%20are,and%20in%20Kabul%3B%20Uzbeks%20in>.
- Qazi Zada, Sebghatullah, and Mohd Ziaolhaq Qazi Zada. 2024. "The Taliban and Women's Human Rights in Afghanistan: The Way Forward." *International Journal of Human Rights* 28(10):1687. doi:10.1080/13642987.2024.2369584.
- RFE/RL's Radio Azadi. 2024. "At Least 1.4 Million Afghan Girls Banned From Attending School Since Taliban Takeover, UNESCO Says." <https://www.rferl.org/a/afghanistan-girls-education-access-taliban/33079700.html>.
- Robina Azizi. 2025. "Ignorance Is No Match for the Power of Knowledge and Education." <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2025/01/ignorance-is-no-match-for-the-power-of-knowledge-and-education/>.
- Security Council. 2023. *Informal Expert Group on Women and Peace and Security of the Security Council: Summary of the Meeting on the Situation in Afghanistan, Held on 26 January 2023*.
- Shaheed, Anisa, and Luth Ali Sultani. 2024. "Women's History Month: Afghan Girls Struggle for Education." *Princeton School of Public and International Affairs*, March 29.
- Shakib, Ahmad Javid. 2025. "Legitimacy Crisis in Afghanistan: Analyzing the Authority of the Afghan Republic and the Rise of the Islamic Emirate." *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities* 5(3):141–49. doi:10.55544/ijrah.5.3.16.

- Tsabitah Rizqi Ekanoviarini, and Aji Wibowo. 2022. "Pelanggaran Hak Perempuan Di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban Berdasarkan Konvensi CEDAW." *Reformasi Hukum Trisakti* 4(4):715–28. doi:10.25105/refor.v4i4.14097.
- UN Women. 2023. "In Focus: After August – Voices of Afghan Women Two Years after the Taliban Takeover." <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2023/08/in-focus-after-august-voices-of-afghan-women-two-years-after-the-taliban-takeover>.
- UN Women. 2024. *AFGHANISTAN GENDER COUNTRY PROFILE 2024*.
- UN Women. 2025. "Four Years after Taliban Takeover, Afghans Overwhelmingly Back Girls' Education." <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2025/08/four-years-after-taliban-takeover-afghans-overwhelmingly-back-girls-education>.
- UN Women. n.d. "Women in the Changing World of Work - Facts You Should Know." Retrieved October 2, 2025. <https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/changingworldofwork/en/index.html>.
- UNICEF. 2025. "As New School Year Starts in Afghanistan, Almost 400,000 More Girls Deprived of Their Right to Education, Bringing Total to 2.2 Million." <https://www.unicef.org/press-releases/new-school-year-starts-afghanistan-almost-400000-more-girls-deprived-their-right>.
- UNICEF. n.d. "Girls' Education - Gender Equality in Education Benefits Every Child." Retrieved October 2, 2025. <https://www.unicef.org/education/girls-education>.
- United Nations General Assembly. n.d. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw.pdf>.
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics." *Source: International Organization* 46(2):391–425. <https://about.jstor.org/terms>.